

**KEBIJAKAN UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION  
IN KOSOVO (UNMIK) DALAM MEMULIHKAN KOSOVO  
PASCA KONFLIK ETNIS  
(1999-2006)**

**Rezki Amelya**  
**email: rezkiamelya92@gmail.com**  
**Supervisor: Drs. Idjang Tjarsono, M.Si**

**Bibliography: 9 books, 2 official documents, 1 journal, 6 websites**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

***Abstract***

*This research will explain about involvement The United Nations as the organization of world peace has a great responsibility and duty in recovering and managing the condition of Kosovo as usual. Directly, as the result this conflict ended with the ethnics conflict between Albanian and Serbian. The ethnic's conflict can be existed in Kosovo generally is because of the ethnic cleansing of Albanian in the era of Slobodan Milosevic by nasionalist of Serbian. The UN Secretary-General submits to the Security Council in accordance of Security Council Resolution 1244 to establishing the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) as a mandate. UNMIK is a civil administrative institution under the authority of United Nation was built on June 10, 1999. The Mission is mandated to help ensure conditions for a peaceful and normal life for all inhabitants of Kosovo and advance regional stability in the Western Balkans.*

*The method used is library research where obtained through literature review from journals, books, mini thesis, reports, and internet to explain UNMIK's planned programs. The writer used the theories in this research are international organization theory and resolution conflict theory.*

*This results of this research indicates that The General Secretary of the United Nations, Boutros Boutros Ghali's term of the Agenda for Peace which covered peacemaking, peacekeeping, and peacebuilding will be the basis for policy of UNMIK. This agendas are calls upon UNMIK to perform basic civilian administrative functions, promote the establishment of substantial autonomy and self-government in Kosovo, facilitate a political process to determine Kosovo's future status, coordinate humanitarian and disaster relief of all international agencies, support the reconstruction of key infrastructure, maintain civil law and order, promote human rights and assure the safe and unimpeded return of all refugees and displaced persons to their homes in Kosovo.*

**Keywords:** *Ethnical Conflict, Kosovo, Policy, UNMIK, Agenda for Peace*

## Pendahuluan

Penelitian ini merupakan studi kepentingan PBB dalam menjalankan perannya sebagai organisasi penjaga keamanan dan perdamaian dunia dengan membantu meredam konflik-konflik yang terjadi di beberapa negara. Peranan PBB dapat lebih jauh lagi dalam bentuk pemulihan keadaan pasca konflik atau pasca perang yang melanda suatu negara. Tidak ada negara yang ingin berada dalam kekuasaan negara lainnya, begitu juga halnya dengan Kosovo. Pecahan Republik Federal Yugoslavia (RFY) yang terbagi atas enam negara bagian yaitu Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina dan Macedonia, menempatkan Kosovo berada di bawah otonomi khusus Serbia.

Penduduk Kosovo dibedakan berdasarkan dua etnis utama, yaitu etnis Albania yang merupakan etnis mayoritas terdiri dari 90% umat muslim dan 5,3% etnis Serbia yang Katolik Ortodoks, selebihnya etnis Bosnia dan minoritas lain. Pada tahun 1989-1999 Presiden Yugoslavia ketika itu bernama Slobodan Milosevic yang beretnis Serbia, memimpikan sebuah “Serbia Raya”. Selama masa pemerintahannya Milosevic banyak melakukan penekanan kepada Kosovo yang sebagian besar adalah etnis Albania beragama Islam. Etnis Albania merasa didiskriminasi Pemerintah Serbia. Milosevic melakukan amandemen pada undang-undang Serbia bahkan menghapuskan hak-hak yang dimiliki oleh etnis Albania. Situasi ini mendorong terjadinya perang antara kelompok etnis Albania yang menamakan diri

*Kosovo Liberation Army* (KLA) melawan pasukan Yugoslavia untuk memisahkan diri dari Pemerintahan Serbia.

Selama menjadi bagian dari Serbia masyarakat Kosovo merasakan pembantaian missal (*genocide*) yang dilakukan Serbia di bawah pimpinan Milosevic. Hal tersebut dilakukan Milosevic untuk menanggulangi pemisahan diri etnis Albania dari Serbia. Konflik etnis meninggalkan bekas yang sangat menyakitkan bagi semua pihak. Banyaknya korban yang meninggal, cacat fisik, serta penderitaan batin, bahkan pertikaian juga membuat apa yang sudah ada dihancurkan. Konflik kekerasan antara kedua etnis ini menimbulkan perhatian dari masyarakat Internasional.

Kosovo menjadi daerah otonomi Yugoslavia sejak dari tahun 1945-1990. Ibukota dari Kosovo adalah Pristina dengan luas 10.900 km<sup>2</sup>, yang dihuni oleh penduduk sebanyak 2.012.500 jiwa dan terdiri dari 210.000 etnis Serbia serta sekitar 1,8 juta jiwa etnis Albania.<sup>1</sup> Sebelum Republik Federal Yugoslavia (RFY) pecah, Jose Broz Tito adalah pemimpin pendahulu Milosevic. Pada masa pemerintahan Jose Broz Tito, Kosovo diberikan keistimewaan berupa status otonomi khusus melalui Konstitusi 1974. Selama kepemimpinan Tito tidak pernah terjadi kerusuhan dalam skala besar. Dapat dikatakan Yugoslavia berada pada puncak kejayaan selama diperintah oleh Tito.

---

<sup>1</sup> Kamil, M.A. 2012. North Atlantic Treaty Organization (NATO) dalam Perspektif Hukum Internasional. Tesis Universitas Indonesia: Jakarta. Hal: 78

Konstitusi 1974 menegaskan kembali ketentuan tentang kesamaan perlakuan terhadap etnis-etnis yang ada. Konstitusi ini juga menambah status dan hak-hak yang legal bagi republik. Suatu bentuk peningkatan desentralisasi yang memberikan otonomi lebih besar kepada dua propinsi otonom, yakni Vojvodina dan Kosovo.<sup>2</sup> Kekuasaan Tito sebagai pemimpin Federasi Yugoslavia berhasil mempersatukan seluruh etnis dan agama di Yugoslavia melalui slogan *Brotherhood and Unity*. Rezim Serbia secara pasti dan sepihak mencabut semua hak dari masyarakat Albania di Kosovo yang telah diakui oleh konstitusi Republik Federal Yugoslavia 1974. Tampak jelas bahwa Milosevic berusaha mengintervensi semua bidang penting kehidupan, dalam upaya untuk “meng-Serbia-kan” rakyat Kosovo. Ciri-ciri utama dari kebijakan pemerintah Serbia menyangkut Kosovo adalah:<sup>3</sup>

- a. Blokade total masyarakat Kosovo-Albania dari perkembangan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaannya.
- b. Diskriminasi sistematis dan pelanggaran HAM berat
- c. Tindakan penyerangan secara fisik keberadaan dan integritas rakyat Albania di Kosovo terutama setelah militer Serbia bertindak di

---

<sup>2</sup> Hadi, Syamsul. 1997. *Politik Standar Ganda Amerika Serikat Terhadap Bosnia*. FoDis: Jakarta. Hal: 33

<sup>3</sup> Kumbaro, Dajena., 2001. *The Kosovo Crisis in An International Law Perspective: Self Determination, Territorial Integrity and the NATO Intervention*. NATO Office of International and Press: Brussels. Hal: 42

Kosovo pada awal musim semi 1998.

Selama ketegangan antara kelompok etnis Albania dan Serbia di Kosovo, tidak hanya perdamaian dalam waktu panjang dan pemulihan fisik maupun psikis masyarakat yang ingin dicapai. Di sisi lain, kondisi ekonomi dan politik di Kosovo perlu segera di benahi agar tidak menambah kesengsaraan masyarakat sipil. Selama tahun 1990-an akibat kebijakan ekonomi Kosovo, sanksi internasional, lemahnya akses untuk perdagangan eksternal dan keuangan, serta konflik etnis sungguh memperburuk ekonomi Kosovo. Dalam lingkungan sosial, kemiskinan masih tersebar luas di Kosovo. Kesempatan kerja khususnya bagi kaum muda, kesehatan dan pendidikan bagi warga Albania Kosovo pun masih membutuhkan perhatian.

Kosovo tetap dikuasai Serbia sampai masuknya NATO memaksa Serbia mundur dari Kosovo. Serangan yang dilakukan oleh NATO atas Serbia merupakan suatu tanggapan terhadap serangan bersenjata dan tidak juga serangan yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Pada Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB<sup>4</sup> disebutkan bahwa Piagam PBB menentang penggunaan kekuatan yang melawan integritas suatu wilayah dari suatu negara, atau tindakan-tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Pasca konflik negara ini sangat membutuhkan berbagai bantuan untuk memulihkan keadaan negara tersebut seperti sedia kala.

---

<sup>4</sup> United Nations Charter. Chapter I, Article 2 (4)

Disinilah peran PBB yang tidak luput dari peredam konflik di negara-negara sebagai organisasi penjaga keamanan dan perdamaian dunia, merasa mempunyai kewajiban untuk ikut serta memulihkan keadaan yang dialami oleh Kosovo. Kondisi yang tidak kondusif ini akhirnya PBB mengesahkan Misi Administrasi Sementara di Kosovo melalui *United Nations Interim Administration Mission in Kosovo* (UNMIK) yang ditugaskan untuk membangun perdamaian, demokrasi, stabilitas dan pemerintahan sendiri di Kosovo pasca lengsernya Milosevic. PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk membentuk UNMIK yang disahkan pada tanggal 10 Juni 1999 dengan Resolusi DK No. 1244. Keterlibatan UNMIK dalam menciptakan perdamaian di Kosovo, memberikan Kosovo status baru sebagai negara dalam perlindungan PBB.

Di bawah naungan PBB rakyat Kosovo semakin bisa menikmati otonomi yang cukup besar. UNMIK dikepalai oleh Wakil Khusus Sekretaris Jenderal untuk Kosovo (*Special Representative of the Secretary-General for Kosovo*) atau disingkat SRSG. Sebagai pejabat sipil internasional paling tinggi di Kosovo, SRSG memimpin pilar-pilar UNMIK dan memfasilitasi proses politik yang dirancang untuk menentukan status masa depan Kosovo. UNMIK memiliki empat pilar dibawah pimpinan (SRSG), yaitu:<sup>5</sup>

(1) Pemerintahan sipil di bawah naungan PBB

- (2) Bantuan kemanusiaan yang dipimpin oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR)
- (3) Demokratisasi dan pengembangan institusi yang dipimpin oleh Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE)
- (4) Reskonstruksi dan pembangunan ekonomi yang dikelola oleh Uni Eropa (EU)

Secara khusus, Resolusi 1244 telah memberi wewenang kepada UNMIK untuk:<sup>6</sup>

- Melakukan fungsi dasar administrasi sipil
- Mempromosikan pembentukan otonomi substansial dan pemerintahan sendiri di Kosovo
- Memfasilitasi proses politik untuk menentukan status masa depan Kosovo
- Mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dan bencana dengan semua lembaga internasional
- Mendukung rekonstruksi infrastruktur utama
- Mempertahankan hukum perdata dan ketertiban
- Mempromosikan hak asasi manusia
- Menjamin pengembalian semua pengungsi dengan memberikan rasa aman dan tanpa hambatan serta orang terlantar ke daerah asalnya di Kosovo.

<sup>5</sup> Kristiningrum. Op.Cit, hal: 116

<sup>6</sup> Joachim Rücker. UNMIK 2006-2008 *Special Representative of the UN Secretary-General*. ([http://www.joachim-ruecker.de/SRSG\\_CALENDAR.pdf](http://www.joachim-ruecker.de/SRSG_CALENDAR.pdf)) diakses pada 27 November 2015

Kebijakan yang dikeluarkan oleh *United Nations Interim Administration Missionin Kosovo* (UNMIK) merupakan respon terhadap konflik yang terjadi di Kosovo. Berdasarkan terminologi *Agenda for Peace* PBB, penulis mengelompokkan Resolusi 1244 yang dimandati DK-PBB kepada UNMIK dalam proses *peacemaking*, *peacekeeping* dan *peacebuilding* sebagai upaya UNMIK memberikan perlindungan dan pemulihan dalam menangani konflik Kosovo. Jadi upaya-upaya yang dilakukan UNMIK untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Kosovo, dapat menekan Kosovo untuk segera mengakhiri konflik yang terjadi sekaligus membawa harapan untuk masa depan Kosovo yang lebih baik.

## Kerangka Teori

Adapun yang menjadi kerangka dasar teoritis dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan **Teori Organisasi Internasional** dan **Teori Resolusi Konflik** sebagai penunjang penelitian ini. Menurut Jack C Plano,<sup>7</sup> yang dimaksud dengan organisasi internasional merupakan suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial, serta bidang lainnya. Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa organisasi internasional sangat berperan dalam pembangunan suatu

negara, bahkan memiliki peran yang penting yaitu sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Organisasi internasional mempunyai kekuatan dalam mendukung kepentingan berbagai negara untuk menyalurkan kepentingan yang melewati batas-batas wilayah nasional. Oleh karena itu, negara-negara dapat berfungsi lebih baik tidak hanya dimata masyarakat internasional tetapi juga masyarakatnya sendiri.

William D. Coplin<sup>8</sup> mengemukakan bahwa organisasi internasional selain sebagai tempat interaksi negara-negara anggotanya dalam menjalankan politik luar negeri, juga bisa dilihat sebagai institusi yang mampu menghasilkan kebijakan (*Policy Maker*) dengan aktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan (*Policy Influencer*). *Policy Maker* dalam organisasi internasional adalah sekretaris Jenderal atau pemimpin badan administrasi (sekretariat). *Policy Influencer* adalah negara anggota, yang bisa dianggap sebagai *partisan influencer* yang sangat berpengaruh karena memiliki *voting power* (kekuatan suara) untuk menentukan kebijakan mana yang bisa dituruti oleh para pengambil keputusan.

Dapat dikatakan peran organisasi internasional merupakan reaksi dari situasi internasional yang muncul. Pengaruh dari berdirinya organisasi internasional dalam kehidupan suatu negara baik pada saat krisis maupun saat membangun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>7</sup> Plano, J. C. et al., 1986. *Kamus Analisa Politik*. Rajawali: Jakarta. hal 271

---

<sup>8</sup> Coplin, William D. 1992. *Introduction of International Politics*. Terjemahan: Drs. Marsedes Marbun. Sinar Baru: Bandung.

bangsa, karena organisasi internasional bertujuan untuk mengembangkan politik dan keamanan nasional disatu pihak serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dipihak lain. Negara anggota merupakan aktor yang paling penting dalam proses pengambilan kebijakan di organisasi internasional.

Konsep resolusi konflik telah menjadi konsep yang begitu kompleks dalam ranah hubungan internasional, terutama bagi penstudi hubungan internasional dewasa ini. Istilah resolusi konflik merujuk pada pendekatan analisis dari sumber dalam situasi konflik antara pihak yang berkonflik. Istilah tersebut juga meliputi proses dimana pemilihan kebijakan dan institusional yang ditemukan dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang sedang berkonflik untuk membentuk dasar dalam resolusi konflik. Johan Galtung merupakan salah satu ahli dalam bidang konflik dan resolusi konflik berasal dari Norwegia.

Johan Galtung menjelaskan di tahun 1960an mengenai *asymmetric conflict* dan *symmetric conflict*. *Asymmetric Conflict* merupakan konflik yang terjadi antara aktor yang memiliki kekuatan tidak imbang, misalnya konflik antara mayoritas dan minoritas, antara sebuah pemerintahan dan kelompok separatis. *Symmetric Conflict* merupakan konflik diantara dua aktor yang tidak memiliki sumber daya yang signifikan.<sup>9</sup> Konflik yang sedang melanda Kosovo adalah

konflik yang termasuk ke dalam *asymmetric conflict*.

Konflik yang berkepanjangan dan berlarut-larut di Kosovo kemudian menimbulkan keinginan untuk mengakhiri konflik tersebut. Dalam situasi ini, Galtung menjelaskan bagaimana konflik dapat disusun hingga menemui resolusi dari konflik tersebut. Proses tersebut meliputi *peacemaking*, *peacekeeping* dan *peacebuilding*. *Peacemaking* diartikan sebagai proses pertemuan antar pihak yang berkonflik untuk melakukan mediasi. Proses selanjutnya adalah *peacekeeping*, merupakan proses dimana ada salah satu pihak diluar dari pihak yang berkonflik melakukan pengurangan hingga memberhentikan konflik. Proses selanjutnya adalah *peacebuilding* yaitu merupakan proses pembangunan perdamaian dengan tindakan-tindakan untuk mencegah munculnya konflik, serta tindakan yang dilakukan untuk memperkuat perdamaian.

## Pembahasan

Penulis mengelompokkan wewenang-wewenang UNMIK ke dalam terminologi *Agenda for Peace* yang dikemukakan oleh sekretaris jenderal PBB Bhoutros Bhoutros Ghali. Agenda tersebut meliputi pertama, *peacemaking* dimana penyelesaian sengketa dengan cara damai menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi antara etnis Albania dengan etnis Serbia difasilitasi dengan kehadiran UNHCR. Kedua, *peacekeeping* adalah penjagaan perdamaian guna melakukan gencatan senjata dan melindungi penduduk sipil agar tidak menjadi korban perang

---

<sup>9</sup> Ramsbotham, Oliver. et al. 2011. *Contemporary Conflict Resolution*. Polity Press: Cambridge. hal 10



dengan bantuan pasukan keamanan KFOR. Ketiga, *peacebuilding* merupakan fase pemulihan pasca konflik yang meliputi pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan, perbankan dan keuangan, pos dan telekomunikasi, serta hukum dan ketertiban.

### **Program Peacemaking UNMIK di Kosovo**

Antara perdamaian positif dan perdamaian negatif merentang berbagai kondisi, baik jika dilihat dari gerakan dari damai menuju konflik (eskalasi) maupun sebaliknya, dari konflik menuju damai (deeskalasi).<sup>10</sup> Tahap lanjut deeskalasi dari pengelolaan konflik adalah berusaha untuk menghentikan konflik, dengan *peacemaking* untuk mengajak pihak-pihak yang bersengketa ke meja perundingan. Tulisan Johan Galtung (1975) yang berjudul *Three Approaches to peace: peacekeeping, peacemaking and peacebuilding* merupakan rujukan penting. Dalam tulisan ini dijelaskan definisi dari masing-masing tahap resolusi konflik. Galtung mendeskripsikan *peacemaking* sebagai proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan.

Tanggung jawab *peacemaking* UNMIK dalam Resolusi 1244 akan dikoordinasikan dalam bentuk kerjasama dengan badan UNHCR

untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan OSCE yang mengurus bidang demokratisasi serta pembangunan kelembagaan Kosovo sebagaimana yang tertera dalam pilar-pilar UNMIK. UNHCR di Kosovo mendapat mandat khusus untuk menjamin kembalinya pengungsi dengan jaminan rasa aman dan tanpa hambatan ke daerah asalnya di Kosovo. UNHCR terlibat dalam pengembangan kerangka kerja legislatif dan administratif di bidang suaka, dokumentasi sipil dan solusi yang dapat bertahan lama. UNHCR juga memperkuat kapasitas pemerintah pusat maupun kota dan membantu mengembangkan serta menerapkan kerangka perlindungan yang memenuhi standar hak asasi manusia internasional dan regional.<sup>11</sup>

UNHCR memberikan kontribusi terhadap pembentukan fungsi sistem suaka di Kosovo. Bekerja sama dengan pihak penegak hukum yang bertanggung jawab dan komunitas internasional, UNHCR berhasil mengembalikan pengungsi dan orang-orang terlantar ke daerah asal mereka di Kosovo. Pada akhir Mei 1999, lebih dari 230.000 pengungsi telah tiba di Macedonia, lebih dari 430.000 orang di Albania dan sekitar 64.000 di Montenegro. Sekitar 21.500 telah mencapai Bosnia dan lebih dari 61.000 telah dievakuasi ke negara-negara lain. Di Kosovo sendiri, diperkirakan 580.000 orang telah kehilangan tempat tinggal.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *United Nations Kosovo Team*, dalam <<http://www.unkt.org/un-agencies/unhcr/>> diakses pada 22 November 2015.

<sup>12</sup> *NATO's Role in Relation to The Conflict in Kosovo*, dalam <<http://www.nato.int/kosovo/history.htm>> diakses pada 22 Desember 2015

---

<sup>10</sup> Anggoro, Kusnanto. 2009. *Post-Conflict Peacebuilding: Naskah Akademik untuk Penulisan Manual*. Propatria Institute: Jakarta. Hal: 1

Misi utama OSCE adalah untuk mengambil peran utama dalam semua hal yang berhubungan dengan lembaga-dan pembangunan demokrasi, serta hak asasi manusia di Kosovo. Di antara operasi lapangan terbesar OSCE, misi yang dijalankan dari beragam kegiatan seperti pengembangan lembaga-lembaga demokratis dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk promosi hak asasi manusia dan supremasi hukum. Hal ini terutama terlibat dalam perlindungan hak-hak masyarakat, pemantauan peradilan, reformasi pemerintahan daerah dan pembangunan institusi yang kokoh, seperti Institut Yudisial Kosovo dan Kepolisian Kosovo. OSCE memonitor lembaga dan membantu memperkuat undang-undang dan kebijakan yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, anti-diskriminasi, kebebasan berekspresi, kesetaraan gender dan memerangi kejahatan terorganisir.<sup>13</sup>

### **Program Peacekeeping UNMIK di Kosovo**

Tahapan yang lebih dikenal sebagai *peacekeeping* dilakukan pula berbagai bentuk komunikasi untuk membuka peluang terjadinya negosiasi agar mencapai suatu kesepakatan. Sederhananya, *peacekeeping* merupakan tindakan penjagaan perdamaian agar tidak pecah kembali perang terbuka antara pihak yang bertikai dengan cara penempatan tentara untuk menjaga perdamaian di daerah-daerah konflik guna melakukan gencatan senjata dan melindungi

penduduk sipil agar tidak menjadi korban perang. Gencatan senjata yang dilakukan oleh para pihak yang sedang terlibat konflik perlu dijaga dan diawasi agar tidak kembali terjadi perang terbuka. Dalam kaitan ini biasanya *peacekeeping* dilakukan dengan menggunakan pasukan perdamaian yang berasal dari beberapa negara di bawah pimpinan PBB.

Melihat aspek *peacekeeping* yang dijalankan oleh UNMIK dengan maksud untuk mengakhiri konflik etnis di Kosovo, PBB memberikan tanggung jawab atas kehadiran pasukan keamanan internasional di Kosovo kepada komando *Kosovo Force* (KFOR) dibawah pimpinan NATO. Pada November 2002, masih ada lebih dari 40.000 tentara NATO di Kosovo dan 10.000 lain di luar Kosovo menjaga perdamaian, sementara PBB mengkoordinasikan banyak aspek untuk pembangunan bangsa.<sup>14</sup> Dewan Keamanan memutuskan kehadiran sipil dan keamanan internasional di Kosovo, di bawah pengawasan PBB.

Perang Kosovo berakhir pada tahun 1999 dengan pembersihan pasukan Serbia dari provinsi, dan pembentukan KFOR yang dipimpin NATO mengambil alih keamanan di Kosovo. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244 memberi amanat kepada KFOR untuk bertanggung jawab atas situasi di Kosovo, mereka harus mempertahankan lingkungan yang aman bagi semua orang di kawasan

---

<sup>13</sup> *OSCE Mission in Kosovo*, dalam <  
<http://www.osce.org/kosovo>> diakses 22  
Desember 2015

---

<sup>14</sup> NATO website,  
<http://www.nato.int/kfor/kfor/about.htm>  
(diakses 15 Desember 2015)



ini.<sup>15</sup> KFOR didirikan ketika kampanye udara 78-hari NATO terhadap rezim Milosevic, yang ditujukan untuk mengakhiri kekerasan di Kosovo. Sekitar 4.600 tentara KFOR di bawah pimpinan NATO, disediakan oleh 31 negara terus bekerja untuk mempertahankan lingkungan yang aman dan aman serta kebebasan bergerak bagi semua warga negara dan masyarakat di Kosovo. Seiring waktu, karena situasi keamanan telah membaik NATO secara bertahap telah menyesuaikan pertahanan KFOR menuju kekuatan yang lebih kecil dan lebih fleksibel dengan tugas statis yang lebih sedikit.

### **Program Peacebuilding UNMIK di Kosovo**

Teori-teori *peacebuilding* mengalami perkembangan seiring dengan bagaimana kerangka teoretikal memahami tentang konflik, sementara dinamika konflik merupakan penghalang terciptanya dinamika damai. Konflik adalah cerminan dari tiadanya damai, seperti halnya damai merupakan refleksi dari ketiadaan konflik. Dalam kaitannya dengan dinamika konflik, proses *peacebuilding* tidak jauh berbeda dari pengelolaan konflik. Proses *peacebuilding* baru dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan damai sehingga tidak mengurangi fungsinya untuk meredam konflik bersenjata, menyelesaikan silang selisih, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Pemulihan pasca konflik perlu diletakkan dalam konteks atau

kerangka *peacebuilding* secara komprehensif. Sebagai sebuah konsep, *peacebuilding* mulai banyak digunakan setelah Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros Ghali mengeluarkan laporannya dalam *An Agenda for Peace* pada tahun 1992. Dalam laporan tersebut, *peacebuilding* dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk “mengidentifikasi dan mendukung berbagai struktur yang bertujuan untuk memperkuat dan mempersolid perdamaian sehingga dapat mencegah terulangnya kembali konflik.”<sup>16</sup>

Proses *peacebuilding* ini membutuhkan jangka waktu yang cukup lama dan terdiri dari berbagai dimensi seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, internasional, dan lain-lain. Berdasarkan resolusi 1244 fungsi dasar administrasi sipil di Kosovo dijalankan oleh UNMIK. UNMIK membentuk pemerintahan sendiri dan membangun kembali infrastruktur utama yang rusak pada saat konflik dengan bantuan kerjasama UE. Pergerakan dari satu tahap ke tahap yang lain tidak secara otomatis.

Pencapaian tujuan perdamaian yang dilakukan oleh UNMIK dilanjutkan pada tahun 2001 dengan mengembangkan dan menjalankan pemerintahan sementara atau *Provisional Institutions of Self Government* (PISG) sesuai dengan *Constitutional Framework*. *Constitutional Framework* atau kerangka konstitusional menetapkan bahwa Kosovo akan diatur secara demokratis melalui legislatif, eksekutif, lembaga dan badan

---

<sup>15</sup> Judah, Tim. 2008. *Kosovo: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press: New York Hal: 44

---

<sup>16</sup> Boutros Boutros Ghali. 1992. *An Agenda for Peace*. United Nations: New York. Hal 11

peradilan bersama PISG pusat.<sup>17</sup> *Constitutional Framework* memberikan peran kepada Majelis Kosovo sebagai wakil tertinggi dan legislatif dari PISG di Kosovo. Hal ini juga memberi PISG wewenang yang terbatas dalam urusan eksternal yaitu, yang berkaitan dengan kerjasama internasional dan termasuk negosiasi dan menyelesaikan segala bentuk persetujuan. Kegiatan ini bagaimanapun harus dikoordinasikan langsung dengan SRSG sebagai Kepala UNMIK. Tanggung jawab yang diberikan oleh PISG tidak mempengaruhi atau mengurangi kewenangan SRSG untuk memastikan implementasi penuh dari Resolusi 1244, termasuk mengawasi PISG, pejabat dan badan-badannya dan mengambil tindakan yang tepat setiap kali tindakan pejabat PISG tidak sesuai dengan Resolusi 1244 atau *Constitutional Framework* itu sendiri.

UNMIK memiliki kewajiban untuk mempromosikan perdamaian dan membawa kemakmuran di Kosovo serta memfasilitasi pembangunan ekonomi yang membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Berdasarkan Resolusi 1244 tahun 1999, Dewan Keamanan memberikan mandat kepada UNMIK untuk mendukung rekonstruksi sebagai kunci infrastruktur dan pembangunan sistem ekonomi-sosial lainnya. Komponen misi ini dipimpin oleh *European Union* (EU) sesuai dengan pilar-pilar UNMIK, bekerjasama untuk pembangunan kembali di Kosovo. Sebagaimana prioritas yang sangat mendesak, UNMIK menyeluruh akan menilai hukum, keuangan, struktur dan

kapasitas fiskal yang ada untuk menerapkan kebijakan untuk pemulihan, pembangunan dan integrasi masa depan Kosovo menjadi ekonomi yang sehat dan lebih berkembang. Rekonstruksi dan pemulihan ekonomi di Kosovo akan berjalan dengan tiga tahap yang meliputi bantuan kemanusiaan langsung, rekonstruksi dan rehabilitasi serta menciptakan ekonomi pasar yang layak dan sistem sosial yang adil.

UNMIK bekerja dengan lima tahap yang terintegrasi dalam proses pemulihan. Tahap-tahap tersebut antara lain:<sup>18</sup>

- Fokus pada pembentukan dan konsolidasi dari otoritas UNMIK dan pemerintahan sementara UNMIK mengatur struktur administrasi.
- Penyebaran petugas polisi internasional dan pasukan keamanan KFOR akan dipercepat.
- Pemberian bantuan darurat untuk pengembalian pengungsi akan menjadi prioritas utama, karena akan dimulainya awal rekonstruksi tempat tinggal untuk memastikan penyelesaian sebelum musim dingin.
- Pelayanan dasar publik akan segera dipulihkan
- Kegiatan pengembangan kapasitas termasuk polisi dan pelatihan peradilan akan dilakukan.

Sejak akhir konflik pada bulan Juni 1999, rekonstruksi Kosovo telah berkembang, karena usaha lokal serta dukungan dari para relawan yang

<sup>17</sup> UNMIK/CoE Agreement. Op.cit Hal: 13

<sup>18</sup> *Ibid.*

bermurah hati sekitar €2 milyar (\$2.57 milyar). Banyak infrastruktur dasar Kosovo yang hancur dalam konflik telah dipulihkan. Lebih dari 50.000 rumah telah dibangun kembali, menyediakan rumah untuk sekitar 300.000 orang dan 1.400 km jalan telah direhabilitasi. Pembangunan klinik kesehatan dan sekolah di seluruh Kosovo telah memastikan bahwa infrastruktur dasar untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagian besar di tempat tinggal. Produksi pertanian telah meningkat secara signifikan seperti gandum, daging sapi dan produksi susu sekarang melebihi tingkat sebelum terjadinya konflik.<sup>19</sup>

## Kesimpulan

Di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244 (1999) pada tanggal 10 Juni 1999, telah memberikan mandat khusus kepada UNMIK di bawah naungan Dewan Keamanan PBB untuk pemulihan di Kosovo. Secara khusus, Resolusi 1244 menyerukan kepada UNMIK untuk melakukan fungsi administrasi dasar sipil, mempromosikan pembentukan otonomi substansial dan pemerintahan sendiri di Kosovo, memfasilitasi proses politik untuk menentukan status masa depan Kosovo, mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dan bencana bagi semua lembaga internasional, mendukung rekonstruksi infrastruktur utama, mempertahankan hukum perdata dan

ketertiban, mempromosikan hak asasi manusia dan menjamin pengembalian semua pengungsi dan orang terlantar dengan aman dan tanpa hambatan ke rumah mereka di Kosovo.

UNMIK memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan Kosovo sebagai provinsi yang masih kosong pemerintah akibat konflik kekerasan di wilayah tersebut. Keterlibatan UNMIK dalam menciptakan perdamaian di Kosovo, memberikan Kosovo status baru sebagai negara dalam perlindungan PBB. UNMIK dibantu oleh para pemimpin dan masyarakat Kosovo membuat langkah yang penting dalam membangun dan mengkonsolidasi demokrasi dan bertanggung jawab terhadap pemerintahan sementara serta menciptakan fondasi untuk fungsi ekonomi. Resolusi 1244 dijadikan sebagai landasan kebijakan UNMIK dan dapat dikatakan misi yang telah berhasil membawa Kosovo ke arah masa depan yang lebih baik.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Kamil, M.A. 2012. North Atlantic Treaty Organization (NATO) dalam Perspektif Hukum Internasional. Tesis Universitas Indonesia: Jakarta.
- Hadi, Syamsul. 1997. *Politik Standar Ganda Amerika Serikat Terhadap Bosnia*. FoDis: Jakarta.
- Kumbaro, Dajena., 2001. *The Kosovo Crisis in An International Law Perspective: Self Determination, Territorial Integrity and the NATO*

<sup>19</sup> *Developments Since 1999*, dalam <[http://web.worldbank.org/archive/website01352/WEB/0\\_\\_PAG-2.HTM](http://web.worldbank.org/archive/website01352/WEB/0__PAG-2.HTM)> Diakses pada 27 Desember 2015

- Intervention*. NATO Office of International and Press: Brussels.
- Plano, J. C. et al., 1986. *Kamus Analisa Politik*. Rajawali: Jakarta.
- Coplin, William D. 1992. *Introduction of International Politics*. Terjemahan: Drs. Marsedes Marbun. Sinar Baru: Bandung.
- Ramsbotham, Oliver. et al. 2011. *Contemporary Conflict Resolution*. Polity Press: Cambridge.
- Anggoro, Kusnanto. 2009. *Post-Conflict Peacebuilding: Naskah Akademik untuk Penulisan Manual*. Propatria Institute: Jakarta.
- Judah, Tim. 2008. *Kosovo: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press: New York.
- Boutros Boutros Ghali. 1992. *An Agenda for Peace*. United Nations: New York.

### **Dokumen Resmi**

*Report Pursuant To Article 2 .2 Of The Agreement Between UNMIK And The Council Of Europe On Technical Arrangements Related to The Framework Convention for The Protection of National Minorities (UNMIK/CoE Agreement)*. Pristina (2005).

United Nations Charter. Chapter I, Article 2 (4)

### **Jurnal**

Kristiningrum, N.D. 2014. *United Nation Interim Administration*

*for Kosovo (UNMIK): Pengaruh Organisasi Internasional PBB Terhadap Pembentukan Pemerintah di Kosovo*. *Global & Policy* 2: 113-120

### **Website**

Joachim Rücker. UNMIK 2006-2008 *Special Representative of the UN Secretary-General*. ([http://www.joachim-ruecker.de/SRSG\\_CALENDAR.pdf](http://www.joachim-ruecker.de/SRSG_CALENDAR.pdf)) diakses pada 27 November 2015

*United Nations Kosovo Team*, dalam <<http://www.unkt.org/un-agencies/unhcr/>> diakses pada 22 November 2015.

*NATO's Role in Relation to The Conflict in Kosovo*, dalam <<http://www.nato.int/kosovo/history.htm>> diakses pada 22 Desember 2015

*OSCE Mission in Kosovo*, dalam <<http://www.osce.org/kosovo>> diakses 22 Desember 2015

NATO website, <http://www.nato.int/kfor/kfor/about.htm> (diakses 15 Desember 2015)

*Developments Since 1999*, dalam <[http://web.worldbank.org/archive/website01352/WEB/0\\_PAG-2.HTM](http://web.worldbank.org/archive/website01352/WEB/0_PAG-2.HTM)> Diakses pada 27 Desember 2015